

Budaya Demokrasi Masyarakat Sipil Manggarai di Media Sosial

Ferdinandus Jehalut, Nyarwi Ahmad

Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio Justisia No. 2, Bulaksumur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281

Email: ferdinandusjehalut1995@mail.ugm.ac.id

DOI: 10.24002/jik.v21i2.8229

Submitted: November 2023

Reviewed: July 2024

Accepted: November 2024

Abstract: *This article explains the democratic culture of civil society of Manggarai on social media based on a case study in the Facebook group Manggarai Bebas Berpendapat. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The result shows that political participation in the group is manifested in the form of information provision, discursive deliberation and contestation, and efforts to influence public policy. Discursive deliberation and contestation appear in the form of user-generated framing wars, symbolic discursive deliberation and contestation, and sentimentality. In general, the democratic culture of Manggarai civil society on social media is dominated by a posttruth democratic culture.*

Keywords: *democratic culture, political participation, posttruth, social media*

Abstrak: *Artikel ini menjelaskan budaya demokrasi masyarakat sipil Manggarai di media sosial berdasarkan studi kasus di grup Facebook Manggarai Bebas Berpendapat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat sipil Manggarai di grup Facebook Manggarai Bebas Berpendapat mewujudkan dalam bentuk penyediaan informasi, deliberasi dan kontestasi diskursif, dan upaya memengaruhi kebijakan publik. Deliberasi dan kontestasi diskursif muncul dalam bentuk perang pembingkai buatan pengguna, deliberasi dan kontestasi diskursif simbolik, serta sentimentalitas. Secara umum, budaya demokrasi masyarakat sipil Manggarai di media sosial didominasi oleh budaya demokrasi pascakebenaran.*

Kata Kunci: *budaya demokrasi, media sosial, partisipasi politik, pascakebenaran*

Demokrasi diguncang oleh gelombang populisme yang dahsyat pada tahun 2016. Donald Trump, calon Presiden Amerika Serikat kala itu, menggunakan slogan *to Make America Great Again* dan *to Take Back Control* serta propaganda antiasing, nativisme, dan xenofobia, untuk merebut dukungan pemilih dalam pemilihan presiden (d'Ancona, 2017, h. 2). Fenomena serupa juga terjadi di Inggris ketika

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, serta para pendukungnya membuat propaganda populis di media sosial untuk menarik dukungan terhadap *Brexit* (keluarnya Inggris dari Uni Eropa). *Brexit* dipropagandakan dapat menghasilkan tambahan dana mingguan sebesar £350 juta untuk layanan kesehatan nasional. Propaganda itu tidak pernah terbukti (d'Ancona, 2017, h. 20).

Fenomena politik seperti di Amerika dan Inggris terjadi juga di Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 diwarnai oleh eksploitasi sentimen agama dan penyebaran berita bohong (disinformasi) serta ujaran kebencian oleh para pendengung dan pemengaruh di media sosial (Lim, 2017, h. 1). Narasi politik sedikit berbeda muncul dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pascapilkada tahun 2020, media sosial di Manggarai dimanfaatkan bukan hanya untuk menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong, melainkan juga untuk meningkatkan partisipasi politik. Hal tersebut tampak dalam keterlibatan masyarakat sipil Manggarai di grup Facebook Manggarai Bebas Berpendapat (MBB) dalam menanggapi sejumlah kasus kontroversial di daerah itu.

Artikel ini berfokus pada studi kasus polemik pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL) di Manggarai dan kasus dugaan suap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang melibatkan Meldyanti Hagur Nabit (Meldy) serta Adrianus Fridus (Fridus). Meldy adalah istri dari Herybertus G. L. Nabit yang menjabat sebagai Bupati Manggarai periode 2021-2024, dan Fridus adalah seorang kontraktor proyek APBD. Peneliti menilai kedua kasus ini cukup merepresentasikan kemunduran demokrasi lokal pada tataran institusi pemerintahan, tetapi justru membangkitkan partisipasi demokratis pada tataran masyarakat sipil Manggarai di media sosial. Kasus-kasus tersebut juga terjadi di tengah makin meningkatnya jumlah kepala daerah yang terjerat korupsi di Indonesia (Zabar, 2022).

Kasus pertama ialah polemik pengangkatan THL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai pada akhir tahun 2021 (Kenaru, 2022a). Pengangkatan THL tersebut menjadi kontroversial karena dinilai tidak transparan dan sarat nepotisme serta bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan lain yang dilanggar ialah Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (Kenaru, 2022b). Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Bima Haria Wibisana, pernah mengatakan bahwa pengangkatan THL di Manggarai tersebut ilegal (Kenaru, 2022a).

Kasus kedua ialah dugaan suap proyek APBD Manggarai tahun 2022 yang melibatkan Meldy sebagai terduga penerima suap dan Fridus sebagai terduga pemberi suap (Manasye, 2022). Kasus yang menyita perhatian publik selama triwulan terakhir 2022 tersebut dibingkai dengan istilah 50 kg kemiri. Istilah tersebut merupakan sandi uang suap Rp 50 juta rupiah yang diduga diberikan oleh Fridus kepada Meldy (Kenaru, 2022c).

Salah satu grup media sosial yang menjadi forum diskusi, debat, dan perang narasi terkait kedua kasus tersebut ialah grup Facebook MBB. Grup Facebook MBB lebih terbuka dibandingkan dengan Yahoo *mailing list* pada tahun 1990-an dan sejumlah grup WhatsApp dari para penulis dan pengamat politik yang cenderung

eksklusif (Budianta, 2021, h. 358). Hal itu memungkinkan beragam aktor berpartisipasi di dalamnya. Diskusi, debat, dan perang narasi serta pembinggkaiian terkait kasus pengangkatan THL dan 50 kg kemiri di grup tersebut bisa dikatakan cukup ramai dan kontroversial. Kenyataan yang sama tidak ditemukan di grup Facebook lainnya di Manggarai, seperti grup Facebook Forum Rakyat Peduli Manggarai.

Artikel ini berfokus pada pengamatan dan analisis budaya demokrasi masyarakat sipil Manggarai di grup Facebook MBB. Artikel ini menggambarkan transformasi budaya demokrasi masyarakat sipil sebagai efek penggunaan media sosial untuk partisipasi politik. Penelitian ini signifikan dilakukan karena sejak diterbitkannya *The Civic Culture* (Almond & Verba, 1963), indikator budaya demokrasi diukur berdasarkan orientasi dan perilaku politik warga. Publik kontemporer sedang mengembangkan nilai-nilai yang lebih asertif dan ekspresi diri yang lebih kritis (Inglehart, 1990; Inglehart & Welzel, 2005; Welzel & Dalton, 2017). Nilai-nilai tersebut bertentangan dengan nilai-nilai setia dari model normatif *The Civic Culture* (Welzel & Dalton, 2017, h. 114). Teori Habermas (1987) tentang demokrasi deliberatif dan Mouffe (2000) tentang demokrasi agonistik menunjukkan pergeseran indikator budaya demokrasi. Habermas menekankan partisipasi warga dalam diskursus publik. Mouffe menekankan partisipasi warga dalam kontestasi diskursif (Dahlberg, 2011, h. 860).

Pemikiran Habermas dan Mouffe menjadi acuan dalam artikel ini untuk membahas ragam model partisipasi politik,

ekspresi diskursus publik, dan kontestasi diskursif masyarakat sipil Manggarai di media sosial Facebook. Menurut peneliti, penelitian terdahulu lebih mendiskusikan kemungkinan platform digital sebagai sarana baru dalam keterlibatan dan partisipasi politik warga. Sementara itu, kebaruan riset ini adalah meneliti partisipasi politik warga di grup media sosial sebagai basis dalam mengidentifikasi budaya politik atau budaya demokrasi di grup Facebook MBB selain riset yang dibuat oleh Zhao dan Lin (2019) di Tiongkok. Zhao dan Lin (2019) mengidentifikasi upaya masyarakat sipil meneruskan (*forwarding*) berita dan informasi yang berhubungan dengan keprihatian sosial dan politik masyarakat di media sosial sebagai *the political culture of forwarding*.

Peneliti lain berfokus pada analisis kemungkinan media sosial atau internet menjadi sarana baru keterlibatan, partisipasi, dan komunikasi politik. Nelson, Lewis, dan Lei (2017) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat sipil secara digital di Amerika menggantikan partisipasi demokrasi konvensional, seperti mengikuti demonstrasi atau menulis surat kepada pemerintah. Chambers dan Gastil (2021), dalam analisis terhadap sejumlah artikel di jurnal *Political Studies*, menemukan bahwa potensi negatif internet untuk demokrasi lebih banyak disoroti oleh para peneliti dibandingkan dengan potensi positifnya.

Lim (2017) serta Ahmad dan Popa (2014) fokus menganalisis penggunaan media sosial untuk partisipasi dan komunikasi politik Indonesia di tingkat lokal. Menurut Lim (2017, h. 14) dalam

konteks Pilkada DKI Jakarta 2017, media sosial tidak saja mendorong kebebasan berekspresi, tetapi juga mendorong kebebasan untuk membenci. Ahmad dan Popa (2014) justru menampilkan tren positif pada penggunaan internet dan jaringan media sosial untuk tujuan politik. Mereka menemukan bahwa selama pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012, jaringan media sosial berhasil dimanfaatkan untuk mentransformasi kampanye partai politik dan para kandidat calon kepala daerah.

Lim (2017) dan Ahmad dan Popa (2014) tidak secara eksplisit menyebutkan pemanfaatan media sosial untuk tujuan pemasaran politik sebagai bentuk budaya baru dalam demokrasi. Mereka lebih berfokus menganalisis pemanfaatan internet dan jaringan media sosial sebagai sarana komunikasi dan pemasaran politik dan tidak secara intensif meneliti partisipasi politik para aktor di dalamnya.

Dibandingkan dengan X dan Instagram, Facebook memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi lebih mendalam karena bisa mengunggah konten tulisan sampai 63.206 karakter. Selain itu, menurut data We Are Social (2023), Facebook menjadi media sosial paling populer hingga Juli 2023 dengan jumlah pengguna mencapai 2,99 miliar pengguna aktif. Angka itu terpaut jauh di atas pengguna Instagram yang hanya mencapai dua miliar pengguna aktif dan X yang hanya mencapai 564 juta pengguna aktif (Annur, 2023).

Riset ini mengacu pada tiga teori yaitu partisipasi politik dan ruang publik, teori budaya demokrasi deliberatif, dan

teori budaya demokrasi agonistik. Teori pertama adalah teori partisipasi politik dan ruang publik. Partisipasi politik dapat dipahami sebagai partisipasi aktif individu atau sekelompok orang dalam kehidupan politik. Partisipasi tersebut tidak terbatas pada partisipasi dalam proses-proses formal demokrasi yang berhubungan dengan institusi-institusi resmi demokrasi, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi juga partisipasi dalam diskusi publik tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Partisipasi politik tersebut dalam artikel ini menjadi basis untuk mengidentifikasi budaya demokrasi masyarakat sipil Manggarai di media sosial.

Partisipasi politik di media sosial dapat mewujudkan dalam bentuk *information provision*, deliberasi, dan upaya memengaruhi kebijakan publik (Tsagarousianou, 1999; Perbawani, Rahayu, & Anshari, 2018, h. 192). *Information provision* tampak dalam upaya masyarakat sipil mengunggah dan membagikan konten yang berhubungan dengan masalah sosial dan politik. Konten itu bisa berupa konten buatan pengguna atau *link* berita dari media *online* tertentu, serta informasi lainnya untuk publik dan para pengambil keputusan. Deliberasi mengacu pada proses formasi opini antara berbagai kelompok masyarakat sipil di media sosial. Proses formasi opini itu tampak dalam komentar dan diskusi masyarakat sipil terkait masalah sosial dan politik yang menjadi keprihatinan bersama. Upaya memengaruhi kebijakan publik mengacu pada mobilisasi gerakan untuk memengaruhi penegak hukum dan/atau pemerintah dalam menyelesaikan

masalah sosial dan politik yang menjadi keprihatinan bersama.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi terjadi di ruang publik. Secara deskriptif, ruang publik dipahami sebagai ruang yang dapat diakses oleh semua orang (Habermas, 1993, h. 1). Menurut Habermas (1997, h. 105), ruang publik adalah ruang deliberasi atau diskursus publik. Akses ke ruang publik secara prinsipiell harus terbuka bagi semua warga negara tanpa kecuali. Porsi ruang publik terbentuk dalam setiap percakapan warga negara. Orang-orang berkumpul di ruang publik untuk membentuk publik (*a public*). Menurut Habermas (1997, h. 105), warga negara bertindak sebagai publik apabila mereka berurusan dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan umum tanpa tunduk pada otoritas atau paksaan dari luar.

Teori yang kedua adalah teori budaya demokrasi deliberatif Jurgen Habermas. Teori ini berpijak pada keniscayaan komunikasi sehari-hari dalam dunia kehidupan (Habermas, 1996, h. 4). Teori demokrasi deliberatif mengacu pada serangkaian proses pembentukan opini, aspirasi, dan kehendak umum dalam memutuskan kebijakan penting untuk kehidupan bersama masyarakat politik. Dalam paradigma demokrasi deliberatif, sejumlah proses komunikasi dan refleksi mengupayakan konsensus atau pemahaman bersama (Habermas, 1987, h. 119).

Komunikasi diskursif juga mengandaikan terpenuhinya klaim-klaim komunikasi ideal. Komunikasi ideal menurut Habermas (1987, h. 120; 1996,

h. 4) harus memenuhi klaim kejujuran, ketepatan, kebenaran, dan kejelasan. Setiap orang yang masuk dalam diskursus harus memenuhi klaim-klaim itu supaya mereka tidak terjebak dalam kontradiksi performatif (Habermas, 1987, h. 121). Kontradiksi performatif terjadi ketika orang terlibat dalam diskursus, tetapi ia sendiri tidak jujur dalam berargumentasi, tidak jelas dalam menyampaikan pendapat, serta tidak tepat dan benar dalam merumuskan ide.

Teori yang ketiga adalah teori budaya demokrasi agonistik Chantal Mouffe. Gagasan Mouffe (2000, h. 102-103) tentang pluralisme agonistik atau demokrasi agonistik berusaha menawarkan alternatif untuk mempertahankan ketidakberdamaian identitas yang berlawanan tanpa menimbulkan permusuhan terbuka. Syaratnya adalah antagonisme harus dijinakkan. Kata *agon* dalam bahasa Yunani cukup untuk merepresentasikan penjinakan yang dapat dicapai dalam perselisihan yang sah di antara para anggota suatu asosiasi politik (Thaler, 2010, h. 789).

Pergeseran antagonisme menjadi agonisme memiliki implikasi mendalam bagi pengakuan terhadap perbedaan-perbedaan dan legitimasi persaingan serta debat tanpa kekerasan. Menurut Mouffe (2000, h. 102-103), sebagai kekuatan pendorong di arena politik, hasrat kolektif mesti dimobilisasi agar sesuai dengan rancangan dan tuntutan demokrasi. Demokrasi menuntut agar ekspresi hasrat kolektif di ruang publik tidak boleh menghancurkan lawan (*opponent*). *Opponent* harus dikonstruksikan sebagai

lawan (*adversary*) dan bukan sebagai musuh (*enemy*). *Opponent* dalam perspektif Mouffe (2000) memiliki makna yang netral, sedangkan *adversary* memiliki makna politis. *Adversary* adalah lawan politik yang posisinya harus dilindungi dan dirawat (Jehalut, 2020b, h. 102).

METODE

Partisipasi politik masyarakat sipil Manggarai di grup Facebook MBB yang kompleks dan dinamis mendorong peneliti memilih pendekatan kualitatif dan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme dalam riset ini dipahami sebagai kelengkapan empiris dan keutuhan alami atau sebagai kekayaan konseptual dan konsistensi teoretis (Blatter, 2008, h. 68). Paradigma konstruktivisme bertolak dari asumsi bahwa kenyataan sosial tidak memiliki arti dalam dirinya sendiri. Arti dan makna kenyataan sosial bergantung pada penafsiran atau konstruksi peneliti (Raho, 2008, h. 15-16). Makna budaya demokrasi masyarakat sipil Manggarai di grup MBB dalam konteks ini sangat bergantung pada interpretasi atau konstruksi peneliti.

Desain penelitian yang digunakan dalam riset ini ialah studi kasus. Menurut Yin (2014, h. 2-4), studi kasus merupakan riset yang berfokus pada individu, kelompok, atau organisasi tertentu. Sementara itu, menurut Blatter (2008, h. 68-69), metode ini sangat cocok digunakan jika peneliti ingin memahami fenomena secara mendalam. Kedalaman dicapai melalui analisis deskriptif-interpretatif terhadap fenomena yang diteliti.

Dua kasus yang dipilih dalam riset ini ialah polemik pengangkatan THL di lingkungan Manggarai pada tahun 2021 dan kasus dugaan suap proyek APBD Manggarai tahun 2023. Kasus-kasus ini justru terjadi di tengah banyaknya jumlah kepala daerah yang terjerat korupsi di Indonesia (Zabar, 2022). Sepanjang tahun 2010-2018, ada 253 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum. Sementara itu, dari tahun 2004 hingga 3 Januari 2022, ada 22 Gubernur dan 148 bupati/wali kota yang telah ditindak oleh KPK (Zabar, 2022).

Penelitian ini menganalisis budaya demokrasi masyarakat sipil Manggarai di grup Facebook MBB. Manggarai dipilih karena dalam kajian beberapa peneliti (Tapung, Lon, Payong, Maryani, & Supriatna, 2018), daerah ini termasuk salah satu daerah yang memiliki khazanah demokrasi lokal, yakni budaya *lonto leok*. Budaya *lonto leok* kurang lebih sama dengan budaya demokrasi lokal masyarakat tradisional Jawa (Hatta, 1970; Tjiptoherijanto & Prijono, 1994). Budaya tersebut dalam asumsi peneliti dihidupi oleh masyarakat Manggarai di Facebook.

Subjek dalam penelitian ini ialah masyarakat sipil Manggarai yang bergabung dalam forum grup Facebook MBB. Masyarakat sipil di sini ialah aktivis sosial demokrasi, kelompok-kelompok kepentingan, dan masyarakat biasa yang memiliki kepekaan akan isu-isu sosial dan politik, serta mengambil peran strategis dalam membentuk asosiasi-asosiasi demokratis. Mereka juga aktif menciptakan

ruang-ruang diskusi yang bebas dalam bidang politik dan demokrasi (Fakih, 1999, h. 47; Jb & Darmawan, 2016, h. 36).

Objek penelitiannya ialah partisipasi politik masyarakat sipil Manggarai di grup Facebook MBB dalam merespons kasus pengangkatan THL dan kasus 50 kg kemiri. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Menurut Sugiyono dan Lestari (2021) teknik ini merupakan salah satu teknik yang familier dalam metode studi kasus jika ingin mendapatkan data yang komprehensif.

Peneliti melakukan observasi partisipatif terhadap unggahan-unggahan dan komentar masyarakat sipil Manggarai di grup Facebook MBB pada dua kasus yang diteliti. Peneliti juga memanfaatkan fitur pencarian berbasis kata kunci, yaitu: 50 kg kemiri, THL, suap proyek, politik balas jasa, kebijakan ilegal, dan calo proyek. Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan kepada 13 orang yang dipilih secara *purposive* yang merupakan aktor atau pembuat konten. Para narasumber tersebut meliputi aktivis, akademisi, masyarakat akar rumput yang tidak berafiliasi dengan partai politik, politisi, dan jurnalis.

Peneliti menggunakan model Miles dan Huberman (1984) untuk menganalisis data. Miles dan Huberman (1984) memetakan empat tahap analisis data, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. Data-data yang sudah dikumpulkan dipetakan berdasarkan kesamaan dan perbedaan pola

dan isinya. Data-data tersebut kemudian direduksi berdasarkan kerangka konseptual yang menjadi acuan peneliti dalam menganalisis temuan penelitian.

HASIL

Berdasarkan pengolahan data, peneliti menemukan ragam model partisipasi politik serta diskursus di grup Facebook MBB. Penulis mencoba menguraikan model partisipasi politik masyarakat Manggarai di grup MBB pada bagian pertama. Setelah itu, penulis menguraikan model diskursus dan aspek diskursif para pihak di Grup Facebook MBB. Berdasarkan uraian itu, penulis kemudian mencoba menjelaskan secara eksplisit model budaya demokrasi masyarakat Manggarai di media sosial.

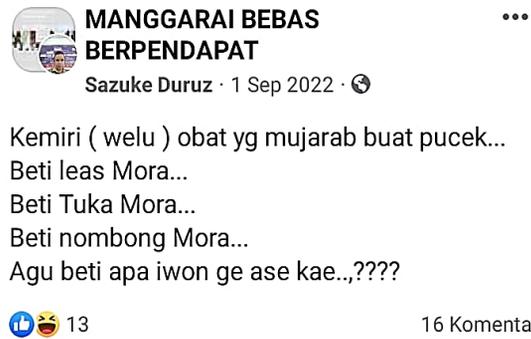
Model Partisipasi Politik Masyarakat Manggarai di Grup Facebook MBB

Ekologi komunikasi di grup Facebook MBB memunculkan tiga model partisipasi politik, yakni penyediaan informasi, deliberasi, dan upaya memengaruhi kebijakan publik. Berdasarkan ketiga model partisipasi politik tersebut, penyediaan informasi menjadi model partisipasi politik yang paling mudah diidentifikasi. Penyediaan informasi di grup Facebook berhubungan dengan aktivitas masyarakat sipil Manggarai untuk mencari, mengumpulkan, memproduksi, dan membagikan konten terkait kasus pengangkatan THL dan kasus 50 kg kemiri. Berdasarkan observasi peneliti dan wawancara mendalam dengan sejumlah narasumber, partisipasi jenis ini turut berkontribusi meningkatkan visibilitas dan viralitas kedua kasus tersebut di grup MBB.

Partisipasi dalam bentuk deliberasi dan upaya memengaruhi kebijakan publik juga cukup familier di grup MBB. Deliberasi di grup tersebut diekspresikan lewat proses formasi opini publik terkait kasus pengangkatan THL dan kasus 50 kg kemiri. Perang narasi, opini, dan *framing* antara kubu yang mendukung dan menentang pemerintah juga muncul di grup MBB. Narasi dan opini dibingkai dengan beragam cara seperti narasi pendek dan menggelitik melalui pesan mikro dan komentar (Gambar 1). Sebagian anggota grup juga ada yang membungkainya dengan satire, sarkasme yang tajam, dan humor yang menggelitik (Gambar 2).



Gambar 1 Contoh Pesan Pendek dan Menggelitik dari Anggota Grup Facebook MBB
Sumber: Hosea (2022)



Gambar 2 Contoh Konten Humor yang Menggelitik tentang Kasus Ratu Kemiri
Sumber: Duruz (2022)

Menurut Mantovany Tapung, akademisi di Universitas Katolik (Unika) Santo Paulus Ruteng, yang diwawancarai pada 15 Maret 2023, perang narasi, opini, dan *framing* di antara aktor-aktor politik grup MBB secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah dan penegak hukum. Setelah munculnya desakan di grup Facebook MBB untuk mengusut tuntas kasus 50 kg kemiri ditambah dengan berita di media *online*, pihak kepolisian langsung memanggil para saksi untuk dimintai keterangan. Hal menarik lainnya adalah Bupati Manggarai periode 2021-2024, Herybertus G. L. Nabit tercatat sebagai salah satu anggota grup MBB.

Model Diskursus Publik dan Kontestasi Diskursif di Grup Facebook MBB

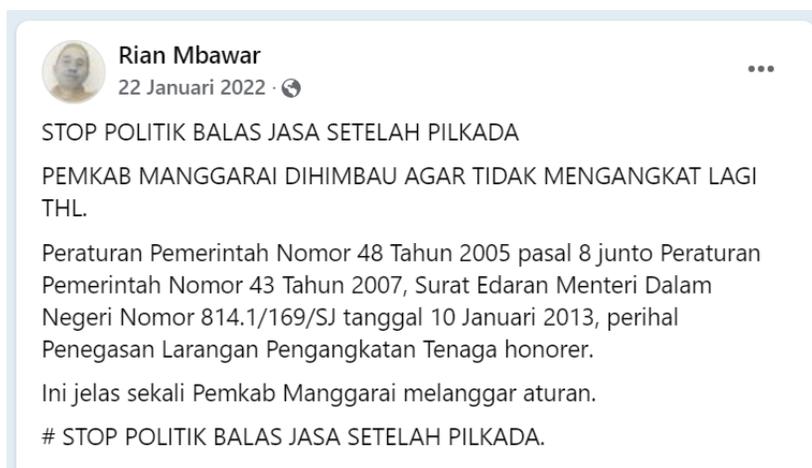
Sebagai sebuah skema penafsiran yang menjadi basis dalam mengidentifikasi suatu masalah (Goffman, 1974, h. 10), pembingkai (*framing*) memang sangat penting untuk mengonstruksi makna, melegitimasi klaim, dan mencari dukungan dalam sebuah gerakan aktivisme dan diskursus *online* (Lupien, Rincon, Lalama, & Chiriboba, 2022, h. 3). Temuan data

menunjukkan viralitas dan visibilitas konten kontroversi pengangkatan THL dan kasus 50 kg kemiri tidak lepas dari strategi *framing* yang kontroversial dan dekat dengan suasana emosional massa/warganet. Meskipun tidak diorganisasi secara struktural dan sistematis seperti dalam media massa konvensional, *framing* yang dilakukan oleh masyarakat sipil Manggarai di grup MBB terkait masalah pengangkatan THL dan 50 kg kemiri tetap memantik atensi publik yang lebih luas. Perhatian tersebut terjadi karena masyarakat sipil di grup tersebut memiliki cara unik dalam mendefinisikan masalah, menganalisis sebab dan akibatnya, menunjukkan penilaian moral, dan mengajukan rekomendasi kebijakan (Entman, 1993; Knüpfner & Entman, 2018, h. 481; Lupien, Rincon, Lalama, & Chiriboga, 2022, h. 3). Sebagai contoh, dalam merespons kasus pengangkatan THL yang dinilai menabrak sejumlah peraturan, seorang warganet atas nama Marianus Mbawar menulis di halaman grup Facebook MBB seperti terlihat pada gambar 3.

Unggahan oleh Mbawar tersebut menuai komentar dari sejumlah warganet. Ada warganet yang menuduh Mbawar sebagai orang yang sakit hati karena kalah Pilkada, namun warganet lain justru mengapresiasi unggahan tersebut. Ada juga warganet yang meninggalkan tanda *like* dan *love* pada unggahan tersebut. Komentar serta tanda *like* dan *love* yang ditinggalkan oleh warganet pada unggahan semacam itu berdampak pada makin besarnya visibilitas unggahan tersebut di halaman Facebook pengguna.

Dalam merespons kasus pengangkatan THL dan kasus 50 kg kemiri di grup Facebook MBB, strategi *framing* dilakukan oleh kelompok yang menentang pemerintah dan kelompok yang mendukung pemerintah. Peneliti menyebut strategi kedua kelompok tersebut dengan istilah perang pembingkaihan buatan pengguna. Perang pembingkaihan buatan pengguna tersebut di grup Facebook MBB tampak dalam tabel 1.

Perang *framing* yang terlihat di tabel 1 menunjukkan bahwa strategi perang pembingkaihan (*framing war*) di media sosial pada dasarnya baik untuk advokasi dan



Gambar 3 Contoh Unggahan Kritik Anggota Grup Facebook MBB
Sumber: Mbawar (2022)

Tabel 1 Framing Kelompok Pendukung Pemerintah dan Kelompok Penentang Pemerintah Terkait Kasus THL dan 50 kg Kemiri

Jenis Kasus	Framing Kelompok Pendukung Pemerintah	Framing Kelompok Penentang Pemerintah
Kasus Pengangkatan THL	Kebijakan sudah sesuai asas kebutuhan; tuduhan kelompok oposisi bersifat sentimental; tidak ada kajian rasional dari kelompok oposisi; kelompok oposisi tidak objektif karena rezim yang mereka dukung sebelumnya juga melakukan hal yang sama, tetapi mereka tidak protes; tidak ada regulasi yang dilanggar; DPR yang menentang kebijakan ini tidak netral karena mereka tidak memprotes kebijakan yang sama pada pemerintahan sebelumnya; yang menolak tersebut adalah kelompok barisan sakit hati yang sudah kalah dalam Pilkada dan tidak mendapatkan jatah kue kekuasaan.	THL selundupan; kebijakan yang melabrak aturan; penguasa yang bertindak sewenang-wenang; THL ilegal; kebijakan tanpa kajian rasional; bentuk nepotisme; politik balas budi; kebijakan yang menambah beban keuangan daerah; syarat nepotisme dan tertutup; bupati lebih mementingkan THL daripada Aparatur Sipil Negara (ASN); politik balas jasa; kebijakan ilegal dan merugikan negara; tidak sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 <i>junto</i> PP Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil <i>junto</i> Surat Edaran Mendagri Nomor 814.169/SJ tanggal 10 Januari 2013; pemerintah menipu rakyat dengan dalih asas kebutuhan; kebijakan yang paradoks karena pada saat yang sama tambahan penghasilan ASN dipotong dan ada juga ASN lainnya justru <i>dinonjobkan</i> ; mengangkangi UU; perubahan sebagai slogan hampa.
Kasus Dugaan Suap kepada Istri Bupati Manggarai (Kasus 50 kg Kemiri)	Sebelum kasus diproses oleh pihak kepolisian: kelompok pro-pemerintah lebih banyak diam sambil terus mendengungkan asas praduga tak bersalah. Pascapenghentian kasus oleh pihak kepolisian karena buktinya dianggap tidak cukup secara hukum: ancam lapor balik pelapor; ini adalah bentuk fitnah yang keji terhadap istri bupati dan keluarganya; politisasi isu; lebih banyak <i>share</i> berita. Bupati Manggarai sendiri bahkan sempat membuat unggahan di grup MBB dengan <i>caption</i> bahwa kebenaran tidak akan pernah dikalahkan.	Ratu kemiri; skenario mempertahankan kekuasaan dan kekayaan pribadi; 50kg kemiri; calo proyek; <i>rogang welu</i> (kulit luar kemiri); vanili: posisi jabatan; kemiri: proyek; kopi: masyarakat; kemiri 50 kg: 50 juta; <i>lawo rakus</i> (tikus rakus); maling proyek; Sambo dan ratu kemiri adalah wujud Firaun yang masih hidup dan pembelanya sebagai kaum farisi (tokoh yang sering dikecam Yesus dalam Kitab Suci Perjanjian Baru karena suka memeras orang dan bersikap munafik).

Sumber: Olahan Peneliti (2023)

aktivisme, tetapi buruk untuk deliberasi. Dalam perspektif demokrasi deliberatif Habermas, diskursus sejatinya diorganisasi untuk mencapai konsensus. Diskursus yang diorganisasi melalui strategi perang *framing* justru mempertajam perbedaan dan polarisasi daripada mencapai konsensus. Selain itu, perang *framing* akan menghasilkan

keriuhan komunikasi di ruang publik *online* (Wahyuni, 2020). Keriuhan komunikasi terjadi ketika orang membingkai dan menulis informasi di ruang publik *online*, tetapi pertanggungjawaban rasional lebih lanjut terhadapnya sangat minim. Masing-masing orang tetap hidup dalam pandangan dan ruang gemanya sendiri tanpa keterbukaan

untuk mempertimbangkan argumentasi rasional pihak lawan (Dahlberg, 2001, h. 625; Chambers, 2003, h. 309; Forestal, 2021, h. 29).

***Like* dan *Share* sebagai Model Baru Diskursus Publik dan Kontestasi Diskursif**

Riset ini juga menemukan model baru diskursus publik yang tidak pernah dibayangkan oleh Habermas dan Mouffe. Habermas (1987) dan Mouffe (2000) membayangkan diskursus publik dan/atau kontestasi diskursif itu hanya dibingkai dengan pertukaran atau pertarungan gagasan melalui debat atau diskusi terbuka di ruang publik. Mereka tidak pernah mengantisipasi kemunculan elemen-elemen simbolik yang disediakan oleh media sosial yang bisa memfasilitasi diskursus. Elemen-elemen simbolik itu di Facebook muncul dalam bentuk fitur *like*, *share*, dan emotikon-emotikon bergerak. Fitur-fitur itu dimanfaatkan oleh pengguna di grup MBB untuk secara tersirat memobilisasi dukungan terhadap suatu gerakan atau perdebatan ketika dukungan terbuka dianggap berisiko.

Pemanfaatan fitur *like* dan *share* untuk memobilisasi diskursus di grup MBB dalam temuan riset ini tidak terlepas dari kemunculan fenomena anonimitas, ujaran kebencian, dan reproduksi disinformasi. Dalam temuan riset ini, reproduksi ujaran kebencian dan disinformasi didorong oleh anonimitas. Dalam wawancara *online*, beberapa pemilik akun anonim secara tegas mengatakan bahwa melalui akun anonim mereka bisa bebas mengkritik pemerintah tanpa takut akan risiko hukuman dan

ancaman sosial dari kelompok pendukung pemerintah. Berikut pernyataan seorang anggota grup MBB terkait anonimitas tersebut.

Eme toe le akun palsu so'o ite, toe ngance ami bebas keta kritik pemerintah one grup MBB hitu. Ai rantang hena le hukuman kole ami. Poli hitu ite, bae kole lami, toe manga lengkap alat d kepolisian dite so'o ce'e kudut kawewe emi. (Kalau tidak menggunakan akun anonim pak, kami tidak bisa bebas mengkritik pemerintah di grup MBB ini. Sebab kami juga takut terjerat hukuman. Selain itu, kami juga tahu bahwa kepolisian setempat tidak memiliki cukup alat pendeteksi untuk mencari kami). (AS, Anggota Grup Facebook MBB, wawancara, 18 Maret 2023)

Meskipun memiliki argumen pembenar, anggota grup lain di MBB mengancam anonimitas di grup itu. Florianus Odus dan Florianus J. Dain yang diwawancarai 10 Maret 2023 mengatakan bahwa kehadiran akun-akun anonim justru menghadirkan ketakutan bagi anggota grup lainnya untuk berpartisipasi dalam diskursus politik di grup MBB. Dua anggota grup MBB yang adalah aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Ruteng atas nama Alfridus Jebaru dan Laurentius Lasa juga mengakui bahwa mereka enggan terlibat dalam diskusi dengan akun-akun anonim di grup MBB karena takut dicerna habis-habisan. Bagi mereka, pola komunikasi yang tidak sesuai dengan etika komunikasi yang seharusnya oleh para pemilik akun anonim di grup MBB berpotensi membunuh karakter orang. Senada dengan beberapa narasumber tersebut, Marianus M. Tapung,

akademisi Unika St. Paulus Ruteng juga mengatakan bahwa akun-akun anonim di grup MBB merupakan parasit demokrasi yang merusak cita rasa demokrasi lokal di Manggarai.

Senada dengan pengakuan Tapung, dua orang narasumber wanita berinisial MG dan SD juga mengakui bahwa mereka menghindari aktif terlibat dalam diskusi dan konfrontasi di grup MBB terkait kasus pengangkatan THL dan 50 kg kemiri karena takut dicaci maki dan dihina oleh para pemilik akun anonim. Sebagai jalan tengah, keduanya memilih memantau saja diskusi dan unggahan di grup tersebut. Mereka memilih memberikan *emoticon love* dan mengklik fitur *like* pada sebuah unggahan. Bagi mereka pemanfaatan fitur umpan balik yang mudah dan cepat tersebut adalah cara sederhana untuk terlibat dalam diskursus *online* ketika dukungan dan partisipasi terbuka dianggap berisiko.

Diskursus Publik dan Kontestasi Diskursif Dikendalikan oleh Sentimen

Model lain dari ekspresi diskursus publik dan kontestasi diskursif di grup Facebook MBB tampak dalam kenyataan dominasi sentimen daripada rasionalitas atau argumentasi. Diskursus publik di grup MBB dalam konteks ini dikendalikan oleh sentimen alih-alih rasionalitas atau argumentasi. Eksploitasi sentimen negatif dalam merespons kasus pengangkatan THL dan kasus 50 kg kemiri di grup MBB justru tampil lebih dominan dibandingkan dengan pertarungan gagasan. Bahkan ada konten tertentu yang mendehumanisasi lawan debat dengan mengasosiasikannya dengan beberapa nama binatang. Ini menggambarkan lemah atau belum matangnya kesadaran demokrasi masyarakat Manggarai di grup MBB. Alih-alih menghidupkan *politics of ideas*, masyarakat di grup MBB justru mereproduksi *politics of sentiment* (lihat gambar 4).



Gambar 4 Contoh Komentar Sentimental di Grup Facebook MBB tentang Kasus 50 kg Kemiri
Sumber: Malung (2023)

Dalam perspektif demokrasi agonistik, sentimen memang tidak dikucilkan sama sekali dari politik demokratis. Permainan sentimen dalam politik dibenarkan sejauh subjek politik tidak sampai mendehumansasi lawan politik pada taraf binatang seperti yang terjadi di grup MBB. Ini mengisyaratkan konstruksi lawan bukan sebagai musuh (*enemy*) yang harus dihabisi dan dibunuh karakternya, melainkan sebagai lawan (*adversary*) yang posisinya harus dihargai dan dipertahankan (Jehalut, 2020a, h. 102).

PEMBAHASAN

Temuan-temuan penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran budaya demokrasi masyarakat sipil sebagai dampak penggunaan media sosial sebagai medium partisipasi politik. Dalam dua contoh kasus riset ini, masyarakat sipil Manggarai cenderung menghayati budaya demokrasi pasca-kebenaran yang ditandai dengan sentimentalitas dan agresivitas. Hal yang dominan dipertontonkan dalam perdebatan publik ialah eksploitasi emosi dan sentimen serta keyakinan pribadi untuk meraih pengaruh dan merebut dukungan publik. Diskursus rasional berbasis data objektif menjadi tidak relevan. Orang cenderung lebih menerima pandangan berbasis emosi dan sentimen serta keyakinan pribadi daripada argumentasi berbasis data objektif dan logika yang ketat (Gunawan & Ratmono, 2021, h. 138; d'Ancona, 2017, h. 1). Kriminalitas dalam demokrasi berpotensi besar muncul dari budaya pasca-kebenaran (Chambers &

Gastil, 2021; Lim, 2017; d'Ancona, 2017; Spoelstra, 2020; Chambers, 2021).

Dominasi budaya pasca-kebenaran di grup Facebook MBB memperlihatkan keterbatasan konsep budaya demokrasi yang telah digagas oleh para teoretisi sebelumnya. Almond dan Verba (1989) misalnya, menempatkan motivasi intrinsik serta orientasi dan perilaku politik individu terhadap sistem politik sebagai basis dalam mengidentifikasi budaya demokrasi. Mereka tidak mengantisipasi pengaruh faktor eksternal, seperti media atau teknologi, terhadap formasi budaya demokrasi masyarakat sipil. Hal yang sama juga tampak dalam pandangan Inglehart dan Welzel (2005). Dalam mengidentifikasi budaya demokrasi masyarakat sipil, mereka cenderung menyoroiti dampak transisi demokrasi di sejumlah negara terhadap sikap warga negara terhadap elite politik. Habermas (2007) dan Mouffe (2009) juga tidak mengantisipasi pengaruh kehadiran media sosial terhadap formasi budaya demokrasi.

Meskipun didominasi oleh budaya demokrasi pasca-kebenaran, ragam model deliberasi dan kontestasi diskursif di grup Facebook MBB memperlihatkan inovasi yang tidak selalu muncul dalam deliberasi dan kontestasi diskursif *offline*. Deliberasi *online* di grup Facebook MBB juga mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh deliberasi *offline*. Dalam deliberasi *offline*, peserta deliberasi didominasi oleh akademisi serta elite ekonomi, politik, dan media. Masyarakat akar rumput hampir tidak mempunyai akses untuk terlibat

dalam deliberasi atau diskursus publik. Sementara itu, deliberasi *online* justru mempromosikan kesetaraan akses bagi semua orang. Grup Facebook MBB pada tataran ini mempromosikan desentralisasi komunikasi politik dan deliberasi publik yang sebelumnya didominasi oleh akademisi serta elite ekonomi, politik, dan media (Dahlberg, 2001; Stevenson, 2002). Kehadiran media sosial tampaknya telah menghapus kecenderungan monopoli komunikasi tersebut. Media sosial memungkinkan proses komunikasi politik dan deliberasi publik terbuka untuk semua (Jehalut, 2023, h. 345). Media sosial dalam konteks ini menjadi saluran komunikasi atau dialog baru antara warga negara atau masyarakat sipil dan pemerintah, perwakilan terpilih serta partai politik (Moss & Coleman, 2014, h. 412-413).

Munculnya keragaman model deliberasi dan kontestasi diskursif di grup Facebook MBB memperlihatkan bahwa demokrasi deliberatif dan demokrasi agonistik telah mengalami dekontekstualisasi dan rekontekstualisasi. Dekontekstualisasi dan rekontekstualisasi terjadi karena adanya transformasi struktur ruang publik, dari ruang publik konvensional menjadi ruang publik *online*. Habermas (2007) sendiri memang tidak berani menyebut media sosial sebagai ruang publik. Menurutnya, media sosial menghasilkan gaya sentrifugal yang melepaskan gelombang anarkis dari sirkuit komunikasi yang sangat terfragmentasi. Struktur komunikasi yang terfragmentasi tidak memungkinkan pemusatan perhatian publik terhadap satu topik tertentu dalam proses formasi opini (Bessant, 2014, h. 48).

Habermas (2007) mungkin benar bahwa media sosial, seperti grup Facebook MBB, tidak layak disebut ruang publik. Media sosial memang tampak tidak mendukung proses formasi opini publik yang ideal. Diskursus di media sosial juga lebih susah dikendalikan dibandingkan dengan diskursus di ruang publik konvensional. Semua orang bisa berbicara apa saja dan kapan saja tanpa perlu kehadiran fisik. Objek tematisasi diskursus juga sering tidak beraturan. Identitas orang yang mencempling dan terlibat dalam diskursus bahkan bisa dipalsukan. Meskipun demikian, media sosial, seperti grup Facebook MBB, memungkinkan munculnya beragam model diskursus yang tidak ditemukan dalam ruang publik konvensional. Diskursus di media sosial dapat dibingkai dengan beragam cara seperti *slacktivism* (aktivisme dengan risiko dan biaya rendah), *clicktivism*, perang narasi dan pembungkaman, serta aktivisme tagar (tanda pagar).

Transformasi struktur ruang publik di grup Facebook MBB juga berimplikasi pada dekontekstualisasi dan rekontekstualisasi konsep tentang subjek politik. Paradigma demokrasi deliberatif Habermas (1998) berpijak pada tradisi demokrasi dan ruang publik di Eropa dan Amerika Serikat. Budaya hukum demokratis di sana sudah berkembang sangat kuat (Hardiman, 2009, h. 224 & 226). Konsekuensinya, subjek politik yang dibayangkan adalah subjek yang sangat rasional. Subjek yang rasional itu terlibat dalam perdebatan atau diskursus terbuka serta memiliki daya tarik pada konsensus.

Paradigma demokrasi agonistik atau disensus lebih banyak dipengaruhi oleh

situasi politik di Amerika Latin. Situasi politik di Amerika Latin ditandai oleh munculnya banyak organisasi yang terlibat dalam gerakan pembebasan dan perjuangan anti-imperialisme (Jehalut, 2020a, h. 46). Ruang publik dalam konteks gerakan dan perjuangan tersebut merupakan ruang kontestasi antara kelas politik dominan dan kelas tertindas. Konteks politik ini menginspirasi Mouffe (2000) untuk menggambarkan subjek politik sebagai subjek afektif yang terlibat dalam gerakan-gerakan sosial dan aktivisme serta perjuangan demokratik baru.

Konteks politik di grup Facebook MBB berbeda dengan konteks di Eropa, Amerika Serikat, dan Amerika Latin. Struktur ruang publik dan ekosistem politik di grup Facebook MBB memungkinkan terbentuknya subjek politik yang cenderung emosional atau afektif. Subjek ini mungkin dekat dengan subjek politik yang digambarkan Mouffe (2000), tetapi bertentangan dengan subjek politik yang digambarkan Habermas (1998).

Subjek politik afektif muncul dalam ragam varian di grup Facebook MBB. Varian pertama ialah subjek afektif-reaktif. Subjek politik ini menolak diskursus yang tenang dan mendalam. Ia lebih tertarik terlibat dalam komentar cepat dan dangkal serta mengabaikan prinsip verifikasi. Varian kedua ialah subjek afektif-agresif. Subjek politik ini umumnya muncul dalam bentuk akun anonim. Konfrontasi ide bagi subjek afektif-agresif tidak terlalu penting atau fundamental. Hal yang lebih fundamental ialah membunuh karakter

lawan dengan senjata retorik dalam bentuk ujaran kebencian dan sarkasme.

Varian ketiga adalah subjek afektif-sentimental. Meskipun tidak bersikap agresif, subjek ini menolak pertimbangan penuh, mendalam, dan rasional. Ia hanya mendukung atau menolak sesuatu hanya berdasarkan kedekatan emosional dengan isu dan pelaku yang sedang diperbincangkan. Varian keempat adalah subjek afektif-rasional. Subjek ini muncul dalam diri para aktivis yang muncul dalam bentuk akun-akun asli. Subjek afektif-rasional ini memang tidak dominan di grup Facebook MBB, tetapi mereka sering muncul dengan argumentasi anti-kemapanan. Mereka berbicara berdasarkan fakta dan logika yang rasional. Subjek afektif-rasional ini menurut penulis dekat dengan gambaran subjek politik dalam demokrasi agonistik Mouffe (2000).

SIMPULAN

Dinamika partisipasi politik masyarakat sipil Manggarai, NTT, di grup Facebook Manggarai Bebas Berpendapat (MBB) tentang polemik pengangkatan THL dan kasus 50 kg kemiri mengungkapkan dinamika praktik budaya sipil di media sosial. Budaya demokrasi deliberatif dan demokrasi agonistik ternyata tidak menjadi model budaya sipil yang paling menonjol dipraktikkan di media sosial Facebook. Budaya sipil yang paling menonjol dipraktikkan di Facebook justru budaya demokrasi *post-truth* seperti tampak dalam praktik masyarakat sipil Manggarai di grup Facebook MBB. Meskipun demikian, hal

tersebut tidak berarti budaya demokrasi deliberatif dan demokrasi agonistik sama sekali lenyap dari praktik masyarakat sipil Manggarai di Facebook. Dalam temuan riset ini, keduanya tetap ada, tetapi wujud atau ekspresinya mengalami kontekstualisasi.

Kontekstualisasi pertama itu berhubungan dengan partisipasi politik sebagai elemen dasar yang merepresentasikan budaya sipil. Partisipasi politik masyarakat sipil Manggarai di grup MBB dalam menanggapi kasus pengangkatan THL dan kasus 50 kg kemiri termanifestasi dalam bentuk penyediaan informasi, deliberasi, kontestasi diskursif, dan partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik. Deliberasi dan kontestasi diskursif di grup MBB muncul dalam banyak bentuk, di antaranya perang *user generated framing*, deliberasi dan kontestasi diskursif simbolik dalam bentuk *like* dan *share*, serta pemanfaatan emotikon-emotikon bergerak dan deliberasi terbuka yang dominan dikendalikan oleh sentimen.

Riset ini juga menemukan bahwa deliberasi dan kontestasi diskursif *online* di grup Facebook MBB mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh deliberasi dan kontestasi diskursif *offline* karena mempromosikan kesetaraan akses kepada semua orang. Dalam konteks ini, terjadi proses desentralisasi demokrasi atau diskursus publik yang sebelumnya cenderung dimonopoli oleh akademisi serta elite politik, ekonomi, dan media.

Berdasarkan sejumlah temuan dan kesimpulan tersebut, peneliti merekomendasikan beberapa hal. Pertama,

riset-riset yang akan datang tentang kultur demokrasi di media sosial perlu memusatkan perhatian pada ragam model ekspresi partisipasi politik warga di berbagai platform media sosial. Pemusatan perhatian pada aspek tersebut dianjurkan karena transformasi teknologi media sosial sangat berpengaruh terhadap ekspresi partisipasi politik warga.

Kedua, peneliti menyarankan perlunya studi lintas perspektif untuk memetakan kecenderungan budaya sipil warga di media sosial. Jika riset selama ini didominasi oleh pendekatan *Habermasian*, riset-riset yang akan datang mungkin perlu juga menganalisisnya secara tajam dari pendekatan *Mouffean* atau pendekatan lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang budaya sipil *online*.

Ketiga, mencermati fenomena anonimitas, ujaran kebencian, dan disinformasi di grup MBB yang berpotensi merusak kultur publik demokrasi deliberatif dan demokrasi agonistik, peneliti merekomendasikan pentingnya literasi politik digital bagi masyarakat sipil Manggarai yang memberi penekanan pada aspek *digital ethics*.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, N., & Popa, I. (2014). The social media usage and the transformation of political marketing and campaigning of the emerging democracy in Indonesia – Case study of the 2012 gubernatorial election of the special region of the capital city Jakarta. In Bogdan Pătruț & Monica Pătruț (Eds.), *Social Media in Politics: Case Studies on the Political Power of Social Media*, p. 97-125. New York, USA: Springer.

- Almond, G. A. & Verba, S. (1963). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. New Jersey, USA: Princeton University Press.
- (1989). *The civic culture – Political attitudes and democracy in five nations*. Edisi ketiga. London, Inggris Raya: Sage Publications, Inc.
- Annur, C. M. (2023, October 10). 15 media sosial terpopuler dunia juli 2023, *facebook* kokoh di puncak. *Katadata.co.id*. <<https://databoks.katadata.co.id/-/statistik/b00bcc9065d9494/15-media-sosial-terpopuler-dunia-juli-2023-Facebook-kokoh-di-puncak>>
- Bessant, J. (2014). The political in the age of the digital: Propositions for empirical investigation. *Politics*, 34(1), 33-44.
- Blatter, J. K. (2008). Case study. In Lisa M. Given (Ed.), *The sage encyclopedia of qualitative research methods* (Vol. 1 & 2), p. 68-71. London, United Kingdom: Sage Publication Inc.
- Budianta. (2021). Budaya demokrasi dalam komunitas digital. Dalam Nasir Tamara (Ed.), *Demokrasi di era digital*, p. 358-364. Jakarta, Indonesia: Yayasan Pustaka Obor.
- Chambers, S. (2003). Deliberative democratic theory. *Annual Review of Political Science*, 6(1), 307-326.
- (2021). Truth, deliberative democracy, and the virtues of accuracy – Is fake news destroying the public sphere? *Political Studies*, 69(1), 147-163.
- Chambers, S. & Gastil, J. (2021). Deliberation, democracy, and the digital landscape. *Political Studies*, 69(1), 3-6.
- Dahlberg, L. (2001). The internet and democratic discourse: Exploring the prospects of online deliberative forums extending the public sphere. *Information, Communication, and Society*, 4(4), 615-633.
- (2011). Re-constructing digital democracy – An outline of four positions. *New Media & Society*, 13(6), 855-872.
- Dalton, R & Welzel, C. (eds.). (2014). *The civic culture transformed – From allegiant to assertive citizens*. New York, USA: Cambridge University Press.
- d’Ancona, M. (2017). *Post truth: The new war on truth and how to fight back*. London, United Kingdom: Ebury Press.
- Duruz, S. (2022, September 1). *Kemiri obat yang mujarab buat pucek beti leas mora beti tuka mora beti nombong mora agu beti apa iwonge*. *Facebook.com*. <<https://www.facebook.com/share/p/uYETWcjDYAPH8UQU/?mibextid=xfxF2i>>
- Entman, R. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51-58.
- Fakih, M. (1999). Masyarakat sipil. *Wacana (Jurnal Ilmu Sosial Transformatif)*, 1(1), 1-6.
- Feenberg, A. (2002). *Transforming technology – A critical theory revisited*. Oxford, New York, USA: Oxford University Press.
- Forestal, J. (2021). Constructing digital democracies – *Facebook*, arendt, and the politics of design. *Political Studies*, 69(1), 26-44.
- Fuchs, C. (2014). *Social media: A critical introduction*. London, Inggris: Sage Publications Ltd.
- Goffman, E. (1974). *Frame analysis*. New York City, USA: Harper & Row.
- Gunawan, B., & Ratmono, B. M. (2021). *Demokrasi di era post-truth*. Jakarta, Indonesia: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Habermas, J. (1987). *The theory of communicative action* (Vol. 2). Boston, USA: Beacon Press.
- (1993). *The structural transformation of the public sphere*. Cambridge, Inggris: The MIT Press.
- (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. Cambridge, Inggris: MIT Press.
- (1997). The public sphere. In Robert E Goodin dan Philip Pettit (eds.), *Contemporary political philosophy – An anthology*, p. 105-124. Milton, Australia: Blackwell Publishing.

- (2002). Three normatif models of democracy. In David Ingram (ed.), *The political*, p. 148-165. Malden, Australia: Blackwell Publishers Inc.
- (2007). *Moral conciousness and communicative action*. Cambridge, The United Kingdom: Polity Press.
- Hardiman, F. B. (2009). *Demokrasi deliberatif – Menimbang negara hukum dan ruang publik dalam teori diskursus jürgen habermas*. Yogyakarta, Indonesia: Penerbit Kanisius.
- Hatta, M. (1970). Colonial society and the ideal of social democracy. Dalam Herbert Feith (ed.). *Indonesian political thinking 1945-1965*. Ithaca, USA: Cornell University Press.
- Hooghe, M. (2015). Book review: The civic culture transformed – From allegiant to assertive citizens. *International Journal of Comparative Sociology*, 56(2), 168-170.
- Hosea. (2022, September 7). *Sook paling keras pelajaran sd milligram mg sentigram cg desigram dg kilogram kg mohon dibantu guyss 50 kilo maksud apa?*. Facebook. <<https://www.facebook.com/share/p/qcpRXu8j68vSmFZp/?mibextid=xfxF2i>>
- Ireton, C. & Posetti, J. (eds.). (2018). *Journalism, 'fake news', & disinformation*. Paris: United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO).
- Inglehart, R. (1990). *Cultural shift in advanced industrial society*. Princeton, NJ, USA: Princeton University Press.
- (1997). *Modernization and postmodernization – Cultural, economic, and political change in 43 societies*. Princeton, NJ, USA: Princeton University Press.
- Inglehart, R., & Welzel, C. (2005). *Modernization, cultural change, and democracy*. New Nork, USA: Cambridge University Press.
- Jb, M. & Darmawan, L. (2016). Wacana civil society (masyarakat madani) di indonesia. *Sosiologi Reflektiv*, 10(2), 35-63.
- Jehalut, F. (2020a). *Paradoks demokrasi – Telaah analitis dan kritik atas pemikiran Chantal Mouffe*. Yogyakarta, Indonesia: Penerbit Gunung Sopai (PGS).
- (2020b). Demokrasi agonistik dan spirit baru pasca-pilkada. *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Unwira*, 3(2), 95-106.
- (2023). Exploring the democratic culture of Indonesian citizens in the virtual universe. In Said M, et al. (eds.), *Communication inclusivity – Enggaging society and digital*, p. 317-356. Jakarta, Indonesia: Cosdev Universitas Pancasila
- Kenaru, J. (2022a). *Kepala BKN sebut THL di manggarai NTT ilegal dan bisa diusut BPK*. *Tvonenews.com*. <<https://www.tvonenews.com/daerah/bali/33187-kepala-bkn-sebut-thl-di-manggarai-ntt-ilegal-dan-bisa-diusut-bpk>>
- (2022b). Bupati Manggarai dicecar DPRD soal angkat puluhan tim sukses dan anak wakil bupati jadi THL. <<https://www.tvonenews.com/daerah/regional/29865-bupati-manggarai-dicecar-dprd-soal-angkat-puluhan-tim-sukses-dan-anak-wakil-bupati-jadi-thl>>
- (2022c). 50 kg Kemiri jadi sandi suap proyek APBD ke istri bupati manggarai. *Tvonenews.com*. <<https://www.tvonenews.com/daerah/regional/64416-50-kg-kemiri-jadi-sandi-suap-proyek-apbd-ke-istri-bupati-manggarai?page=1>>
- Kihlström, A. (2020). *Communicative legitimacy: Habermas and democratic welfare work*. Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Knüpfen, C. B. & Entman, R. (2018). Framing conlicts in digitl and transnational media enviroments. *Media, War & Conflict*, 11(4), 476-448.
- Kosfraedi, O. (2024). Potret kehidupan kolektif masyarakat Manggarai dalam budaya lonto leok *Goodnewsfromindonesia.id*. <<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/02/12/potret-kehidupan-kolektif-masyarakat-manggarai-dalam-budaya-lonto-leok>>
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411-427.

- Lupien, P., Rincon, A., Lalama, A. & Chiriboga, G. (2022). Framing indigenous protest in the online public sphere – A comparative frame analysis. *New Media and Society*, 26(3), 1-19.
- Malung, S. (2023, Februari 26). Para aktivis wingis itu di byar n terorganisir membentuk kelompok pembenci penghasut pecundang tidak punya attitude salam waras. *Facebook.com* <<https://www.facebook.com/share/p/xmJ9sD8HdHtig2VR/?mibextid=xfxF2i>>
- Manasye, Y. (2022, September 15). Istri bupati manggarai diperiksa terkait dugaan jual beli proyek APBD. *Mediaindonesia.com*. <<https://mediaindonesia.com/nusantara/522755/istri-bupati-manggarai-diperiksa-terkait-dugaan-jual-beli-proyek-apbd>>
- Mbawar, M. (2022, Januari 22). *Stop politik balas jasa setelah pilkada. pemkab manggarai dihimbau agar tidak mengangkat lagi THL*. *Facebook.com*. <<https://www.facebook.com/share/p/E1rNiWEAx8cGn2ep/?mibextid=xfxF2i>>
- Miles, M. B., Huberman, A.M. (1984). *Qualitative data analysis – A sourcebook of new methods*. New York, USA: Sage Publication.
- Mouffe, C. (1993). *The return of the political*. London, Inggris: Verso.
- (2000). *The democratic paradox*. London, Inggris: Verso.
- (2005). *On the political – Thinking in action*. Abingdon, Inggris: Routledge.
- (2009). Prosiding. Democratic politics and agonistic pluralism. *Seminario interdisciplinar O(s) Sentido(s) Da(s) Cultura(s) Coordinando Por Ramón Maiz*, Venres, 18 Desember 2009.
- Moss, G. & Coleman, S. (2014). Deliberative manoeuvres in the digital darkness – E-democracy policy in the UK. *The British Journal of Politics and International Relations*, 16 (1) 410-427
- Nelson, J. L., Lewis, D. A., & Lei, R. (2017). Digital democracy in America: A look at civic engagement in an internet age. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 94(1), 318–334.
- Perbawani, P. S., Rahayu, & Anshari, I. N. (2018). Online political participation and netizen anonymity in indonesia’s digital democracy. *Power Conflict Democracy Journal*, 4(2), 185-212.
- Raho, B. (2008). *Metode penelitian sosial bagi para pemula*. Ende, Indonesia: Penerbit Nusa Indah.
- Spoelstra, S. (2020). The truth and falsehood of post-truth leaders. *Leadership*, 16(6), 757-764.
- Stevenson, N. (2002). *Understanding media cultures – Social theory and mass communication* (2nd ed.). London, Inggris: Sage Publications.
- Sugiyono & Lestari, P. (2021). *Metode penelitian komunikasi (kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional)*. Bandung, Indonesia: Penerbit Alfabeta.
- Tapung, M., Lon, Y.S., Payong, M. R., Maryani, E., Supriatna, N. (2018). Prosiding. Developing the value of “lonto leok” in manggarai culture to empower the skill of social problem-solving in social-sciences learning of junior high school. *Proceedings of the Annual Conference on Social Sciences and Humanities – Revitalization of Local Wisdom in Global and Competitive Era*, 316-320.
- Thaler, M. (2010). The illusion of purity: chantal mouffe’s realist critique of cosmopolitanism. *Philosophy and Social Criticism*, 36(7).
- Tjiptoherijanto, P., & Prijono, Y. M. (1994). Demokrasi dalam masyarakat tradisional Jawa. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 42(4), 395-403.
- Tsagarousianou, R. (1999). Electronic democracy: Rhetoric and reality. *Communications (The European Journal of Communication Research)*, 24(2), 189-208.
- Wahyuni, H. I. (2020). *Keriuhan Komunikasi*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- We Are Social. (2023). Social media use reaches new milestone. *Wearesocial.com*. <<https://>

- wearesocial.com/id/blog/2023/07/social-media-use-reaches-new-milestone/>
- Welzel, C., & Dalton, R. (eds.). (2014). *The civic culture transformed – From allegiant to assertive citizens*. New York, USA: Cambridge University Press.
- (2017). Cultural change in asia and beyond – From allegiant to assertive citizens. *Asian Journal of Comparative Politics*, 2(2), 112-132.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research design and methods* (edisi kelima). St Peters, USA: COSMOS Corporation.
- Zabar, T. (2022, Februari 7). *Korupsi kepala daerah*. <<https://antikorupsi.org/id/korupsi-kepala-daerah>>
- Zhao, Y., & Lin, Z. (2019). The political cultures of forwarding on chinese social media – Lessons from hong kong chief executive election. *Sage Open*, 9(2), 1-11.